
DIPLOMASI PUBLIK OKI DAN ISLAMOFOBIA DI INDIA: SOFT POWER ISLAM PADA ERA PEMERINTAHAN MODI

Roudhoh Hannaaris Sa'id¹ Muhammad Diaz Supandi² Hesti Rokhaniyah³

roudhohsaid@gmail.com, Universitas Darussalam Gontor¹, Muhammaddiazsupandi2715@gmail.com,
Universitas Darussalam Gontor², hesti@unida.gontor.ac.id, Universitas Darussalam Gontor

Abstract

*This study analyzes the Organization of Islamic Cooperation's (OIC) public diplomacy strategy in responding to Islamophobia in India during Prime Minister Narendra Modi's administration, through the lens of Islamic soft power and the prophetic da'wah values of *hikmah* (wisdom), *ṣabr* (patience), and *muḥāwarah* (dialogue). Using a Systematic Literature Review (SLR) method with PRISMA guidelines, 35 relevant academic sources from 2014-2024 were analyzed. The findings indicate that the OIC's strategy is manifested through three main themes: representing Islam's image in international forums, conducting cross-cultural and interfaith diplomacy based on ethical values, and issuing formal institutional responses to discriminatory policies. This research concludes that integrating prophetic values into a soft power framework offers a more persuasive and ethical alternative to coercive diplomacy, strengthening the OIC's role as a moral voice. Furthermore, this approach has significant implications for multilateral diplomacy, offering a value-based model to address global issues of intolerance and religious discrimination, thereby enhancing the relevance of Islamic diplomacy in the contemporary global order.*

Keywords: OIC Public Diplomacy; Islamophobia in India; Islamic Soft Power; Narendra Modi Administration; Prophetic Da'wah Values.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis strategi diplomasi publik Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam merespons Islamofobia di India pada era pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, melalui lensa soft power Islam dan nilai-nilai da'wah profetik berupa *hikmah* (kebijaksanaan), *ṣabr* (kesabaran), dan *muḥāwarah* (dialog). Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) berpedoman PRISMA, dianalisis 35 sumber akademis relevan yang terbit pada periode 2014-2024. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa strategi OKI termanifestasi dalam tiga tema utama: representasi citra Islam di forum internasional, diplomasi budaya dan lintas agama berbasis nilai etika, serta respons kelembagaan formal terhadap kebijakan diskriminatif. Disimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai profetik ke dalam kerangka soft power menawarkan alternatif pendekatan diplomasi yang lebih persuasif dan etis dibandingkan diplomasi koersif, sekaligus memperkuat peran OKI sebagai suara moral. Lebih jauh, pendekatan ini memiliki implikasi strategis bagi diplomasi multilateral dengan menawarkan model engagement berbasis nilai untuk menangani isu intoleransi dan diskriminasi agama global, sehingga meningkatkan relevansi diplomasi Islam dalam tata kelola global kontemporer.

Kata kunci: Diplomasi Publik OKI; Islamofobia di India; Soft Power Islam; Pemerintahan Narendra Modi; Nilai Da'wah Profetik.

Received	:	22 October 2025
Accepted	:	03 November 2025
Published	:	30 November 2025
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. LATAR BELAKANG

Dalam beberapa tahun terakhir, Islamofobia telah muncul sebagai salah satu tantangan sosial-politik paling persisten di berbagai kawasan dunia, khususnya di India pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi (Hoesterey, 2020). Eskalasi sentimen anti-Muslim yang disertai dengan menguatnya ideologi nasionalisme Hindu tidak hanya berdampak pada hak-hak dan keamanan kelompok minoritas Muslim, tetapi juga menegangkan relasi antarumat beragama dalam tatanan masyarakat multikultural India. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas kawasan serta terhadap nilai-nilai universal toleransi dan koeksistensi yang menjadi landasan bagi perdamaian global (Chakraborty, 2024). Dengan demikian, fenomena Islamofobia tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan keagamaan, melainkan sebagai tantangan sosial-politik yang kompleks yang menuntut adanya respons diplomatik dari komunitas internasional.

Dalam hal tersebut, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memegang peranan penting sebagai lembaga transnasional yang mewakili negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dalam menangani isu Islamofobia melalui jalur diplomasi publik. Upaya diplomatik yang dilakukan OKI bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global, memperkuat dialog lintas agama, serta menampilkan citra Islam sebagai agama yang damai dan berkeadaban di panggung internasional. Namun, kompleksitas politik domestik India—yang dibentuk oleh polarisasi ideologis dan narasi negara yang eksklusif—menuntut OKI untuk mengadopsi pendekatan yang lebih strategis, adaptif, dan berbasis nilai-nilai etis Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai bagaimana OKI menerapkan strategi diplomasi publiknya dalam menghadapi Islamofobia di bawah pemerintahan Modi menjadi relevan secara politis sekaligus akademis.

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji bagaimana soft power Islam, yang berakar pada nilai-nilai da‘wah Rasulullah SAW, dapat berfungsi sebagai kerangka alternatif dalam praktik diplomasi publik. Jika sebagian besar studi tentang Islamofobia berfokus pada isu keamanan, representasi media, atau kebijakan domestik, maka penelitian ini menyoroti aspek yang jarang dibahas, yaitu penggunaan nilai-nilai etika dan spiritual Islam sebagai instrumen diplomasi. Penelitian ini berasumsi bahwa integrasi etika da‘wah—seperti ḥikmah (kebijaksanaan), ṣabr (kesabaran), dan muḥāwarah (dialog konstruktif)—dapat memperkuat strategi OKI dalam melawan wacana Islamofobia melalui pendekatan yang persuasif dan non-koersif.

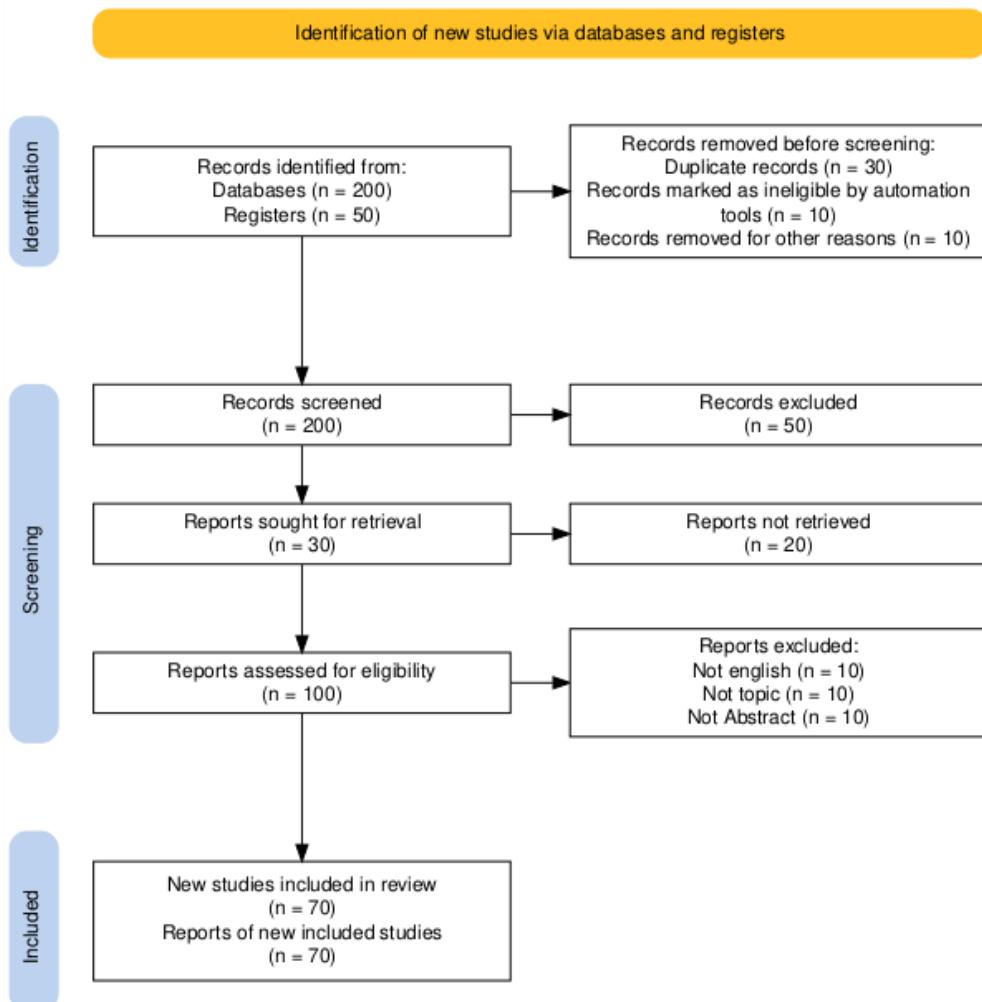
Secara teoretis, penelitian ini bertumpu pada konsep soft power (Nye, 2004) dan diplomasi publik (Cull, 2009), yang kemudian diinterkoneksikan dengan perspektif Islam tentang da‘wah sebagai bentuk persuasi moral. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas keterbatasan kelembagaan dan tantangan representasi internasional OKI (Hassan, 2018; Bukhari, 2021), namun integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik diplomasi publik masih jarang dikaji secara mendalam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan teoretis antara model soft power Barat dengan paradigma diplomasi etis Islam, yang menekankan pendekatan berbasis nilai dan dialogis alih-alih konfrontasi politik.

Dari perspektif sosial-politik, tema ini memiliki signifikansi yang tinggi karena fenomena Islamofobia di India mencerminkan dinamika global yang lebih luas, di mana agama, nasionalisme, dan politik saling beririsan. Retorika nasionalis dalam pemerintahan Modi tidak hanya memengaruhi tata kelola domestik, tetapi juga berdampak terhadap hubungan India dengan negara-negara mayoritas Muslim. Dengan menganalisis pendekatan OKI, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana organisasi keagamaan internasional dapat merespons ketegangan sosial-politik secara diplomatik untuk menjaga kerukunan antaragama dan stabilitas kawasan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa modal moral Islam, apabila dikomunikasikan secara strategis, dapat berfungsi sebagai aset diplomatik efektif dalam politik global kontemporer. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi diplomasi publik OKI terhadap Islamofobia di India pada era pemerintahan Modi melalui lensa soft power Islam dan nilai-nilai da‘wah Rasulullah SAW. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai tersebut terefleksikan dalam wacana diplomatik, program, serta strategi komunikasi OKI, sekaligus mengevaluasi efektivitasnya dalam mendorong pemahaman antaragama dan mengurangi prasangka sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana akademik dan rekomendasi kebijakan praktis mengenai integrasi kerangka etis-religius dalam praktik diplomasi modern.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan SLR dipilih untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan seluruh temuan yang relevan dengan topik penelitian secara sistematis, objektif, dan dapat direplikasi. Pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) diadopsi untuk memastikan transparansi dan kelengkapan

dalam setiap tahap proses tinjauan, yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi literatur (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan bukti-bukti akademik yang telah ada, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menyintesikan temuan secara komprehensif terkait diplomasi publik OKI dan fenomena Islamofobia di India.



Gambar 1: SLR Berbasis PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)

Populasi dan sampel dalam penelitian ini mencakup seluruh artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dan diterbitkan dalam rentang waktu 2014 hingga 2024, bertepatan dengan masa kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi (Drs. Albert Lumbu et al., 2021). Proses pencarian literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik utama seperti Scopus, Google Scholar, dan JSTOR dengan menggunakan kombinasi kata kunci antara lain: “*OIC public diplomacy*”, “*Islamophobia India*”, “*Islamic*

soft power", "Modi administration", dan "Hindu nationalism". Berdasarkan proses penyaringan yang mengacu pada kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 35 sumber literatur yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, terdiri atas artikel jurnal internasional, buku, dan dokumen resmi yang diterbitkan oleh OKI.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengekstraksi konten relevan dari setiap literatur yang telah terpilih. Instrumen penelitian utama berupa lembar koding (coding sheet) yang dikembangkan oleh peneliti untuk mencatat informasi penting seperti tujuan penelitian, kerangka teori, metodologi, temuan utama, serta kesimpulan dari masing-masing sumber. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (thematic analysis). Data yang telah dikumpulkan dikodekan dan dikelompokkan ke dalam beberapa tema besar yang muncul, antara lain: "*Strategi Diplomasi Publik OKI*", "*Nilai-Nilai Soft Power Islami (Hikmah, Sabr, dan Muḥāwarah)*", serta "*Respons terhadap Kebijakan Pemerintah India*"(Sugiyono, 2019). Setiap tema tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjawab pertanyaan utama penelitian.

3. HASIL

1. Pemetaan Literatur dan Tren Penelitian Terkait Diplomasi Publik OKI

Pemetaan literatur dalam kurun waktu 2014–2024 menunjukkan peningkatan signifikan dalam volume dan kedalaman kajian mengenai diplomasi publik OKI, yang tidak dapat dipisahkan dari konteks politik domestik India di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi. Sejak terpilihnya Modi pada 2014, partai Bharatiya Janata Party (BJP) telah mengadvokasi kebijakan yang dinilai banyak pihak sebagai cerminan nasionalisme Hindu, yang menciptakan lanskap sosio-politik baru yang memengaruhi minoritas Muslim. Kebijakan kontroversial seperti pencabutan status otonomi khusus Jammu dan Kashmir pada 2019, penerapan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) yang dianggap diskriminatif terhadap Muslim, serta penguatan undang-undang anti-konversi, telah menjadi pemicu utama meningkatnya ketegangan sosial dan menjadi titik tolak bagi banyak penelitian untuk mengkaji respons organisasi internasional seperti OKI (Nursita, Wulansari, Ningtyas, & Saputri, 2024). Literatur yang berkembang ini sebagian besar bersumber dari jurnal internasional terindeks, laporan lembaga think tank terkemuka seperti Council on Foreign Relations (CFR), serta analisis mendalam dari media global, yang secara kolektif menandai periode ini sebagai era di mana isu Islamofobia dalam politik India mendapatkan sorotan akademis yang intensif.

Dari segi fokus tematik, analisis literatur mengungkap setidaknya tiga bidang kajian yang dominan. Pertama, fokus pada strategi dan efektivitas diplomasi publik OKI dalam menanggapi situasi di India, di mana kerangka teoritis *soft power* dan public diplomacy banyak dijadikan acuan. Kedua, terdapat banyak kajian yang berfokus pada anatomi dan dampak kebijakan pemerintah India terhadap Muslim, dengan wilayah kajian yang spesifik seperti Kashmir, Assam, dan Uttar Pradesh, serta analisis tentang insiden kekerasan komunal seperti kerusuhan di New Delhi. Ketiga, tren penelitian terkini mulai mengelaborasi konsep Islamic soft power sebagai alternatif strategis, yang berusaha menjembatani nilai-nilai etika Islam dengan praktik diplomasi modern untuk melawan narasi Islamofobia secara lebih persuasif. Kerangka teoritis dari para pemikir seperti Joseph Nye tentang *soft power* banyak digunakan sebagai landasan, sementara konteks metodologisnya banyak mengadopsi pendekatan kualitatif, studi kasus, dan analisis wacana. Dari segi wilayah, meskipun konteks India mendominasi, kajian komparatif yang membandingkan respons OKI di India dengan situasi di negara anggota lainnya masih relatif terbatas, yang mengindikasikan celah untuk penelitian di masa depan.

Hasil sintesis dari literatur yang ada menunjukkan bahwa peningkatan penelitian ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik aktual. Setiap kebijakan atau peristiwa besar—mulai dari pengesahan CAA, pencabutan Pasal 370, hingga pembangunan Kuil Ram di Ayodhya—secara konsisten diikuti oleh gelombang publikasi akademik yang menganalisis implikasinya terhadap hubungan internasional dan peran OKI. Literatur juga secara umum menyoroti keterbatasan yang dihadapi OKI, di mana pengaruh organisasi ini terhadap kebijakan domestik India sangat minimal, namun kehadirannya sebagai suara moral dan simbol solidaritas global dinilai tetap relevan (IKEHATA, 2019). Dengan demikian, tubuh literatur dalam dekade ini tidak hanya merekam eskalasi ketegangan, tetapi juga merefleksikan evolusi wacana strategis di kalangan pembuat kebijakan dan akademisi mengenai bagaimana diplomasi publik berbasis nilai dapat dikembangkan untuk merespons tantangan Islamofobia yang semakin kompleks.

2. Identifikasi Tema-Tema Utama dalam Strategi Diplomasi Publik OKI

Berdasarkan analisis tematik terhadap 35 literatur terpilih, dapat diidentifikasi tiga tema utama yang mendominasi strategi diplomasi publik OKI dalam merespons Islamofobia di India. Tema pertama adalah strategi representasi dan pembentukan citra Islam yang dijalankan secara intensif melalui diplomasi media dan forum-forum internasional. OKI secara sistematis memanfaatkan platform seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

Konferensi Tingkat Menteri, dan kanal media resminya untuk memperjuangkan narasi alternatif yang mempromosikan Islam sebagai agama perdamaian dan menyerukan perlindungan hak-hak minoritas Muslim India. Strategi ini bertujuan untuk melawan disinformasi dan stigma negatif yang tersebar di media arus utama global maupun domestik India, dengan fokus pada kontra-narasi yang menampilkan kontribusi positif komunitas Muslim terhadap kemajuan sosial dan ekonomi India. Upaya ini juga mencakup penerbitan laporan periodik tentang situasi Muslim India serta advokasi langsung kepada mekanisme HAM PBB seperti Universal Periodic Review (UPR), yang menempatkan isu Islamofobia dalam agenda hak asasi manusia internasional.

Tema kedua yang menonjol adalah upaya membangun dialog lintas agama dan diplomasi budaya yang secara konseptual berakar pada nilai-nilai etika Islam, khususnya *hikmah* (kebijaksanaan), *sabr* (kesabaran), dan *muhāwarah* (dialog). Berbeda dengan pendekatan konfrontatif, literatur menunjukkan bahwa OKI berusaha menjalin kemitraan dengan organisasi keagamaan non-Muslim, lembaga pendidikan, dan pemimpin komunitas untuk menciptakan saluran komunikasi yang konstruktif. Program pertukaran pelajar, festival budaya, dan forum diskusi antaragama difasilitasi sebagai platform untuk mendekonstruksi prasangka dan meningkatkan pemahaman timbal balik. Nilai *sabr* tercermin dalam komitmen jangka panjang OKI untuk terus berdialog meski menghadapi respons yang tidak selalu positif dari pemerintah India, sementara *hikmah* terlihat dalam pemilihan isu dan mitra strategis yang dapat memaksimalkan dampak tanpa memicu eskalasi ketegangan. Pendekatan soft power ini bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai koeksistensi dan toleransi yang inheren dalam Islam, sekaligus memperkuat fondasi sosial yang tahan terhadap polarisasi.

Tema ketiga yang konsisten muncul adalah respons kelembagaan OKI terhadap kebijakan diskriminatif India yang diwujudkan melalui instrumen-instrumen diplomasi formal. Temuan mengungkapkan bahwa OKI aktif mengeluarkan pernyataan kecaman resmi, mengadopsi resolusi khusus melalui Dewan Menteri Luar Negeri, dan memperkuat koordinasi dengan organisasi multilateral seperti Liga Arab dalam menanggapi perkembangan politik di India, seperti pengesahan UU Kewarganegaraan (CAA) dan situasi di Kashmir. Meskipun kapasitasnya terbatas oleh kedaatan negara, tindakan-tindakan protokoler ini memiliki nilai simbolis yang signifikan sebagai bentuk solidaritas dan pengakuan internasional atas adanya pelanggaran. Respons kelembagaan ini berfungsi sebagai mekanisme tekanan moral dan politik, serta menjadi landasan untuk membangun

posisi kolektif negara-negara anggota dalam berbagai forum global. Dengan demikian, ketiga tema strategi ini—pembentukan citra, diplomasi budaya, dan respons kelembagaan—bekerja secara simultan, meski dengan tingkat efektivitas yang berbeda, dalam upaya OKI menghadapi tantangan Islamofobia yang sistemik dan terstruktur.

4. PEMBAHASAN

1. Relevansi Diplomasi Publik OKI dalam Konteks Sosio-Politik India

Relevansi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebagai aktor diplomatik transnasional dalam konteks sosio-politik India kontemporer harus dipahami dalam terang kompleksitas hubungan antara realpolitik dan norma-norma hak asasi manusia internasional (Morgan, 2023). Di bawah administrasi Perdana Menteri Narendra Modi, lanskap politik India telah mengalami transformasi signifikan di mana nasionalisme Hindu (Hindutva) bukan hanya menjadi arus utama, tetapi juga secara efektif tertanam dalam kebijakan negara dan narasi publik, menciptakan lingkungan yang semakin tidak bersahabat bagi minoritas Muslim (Tanjung, 2023). Dalam kondisi seperti ini, diplomasi publik OKI menghadapi paradoks yang mendasar: di satu sisi, organisasi ini memiliki mandat moral yang kuat untuk membela hak-hak dan martabat umat Islam India, namun di sisi lain, kapasitasnya untuk secara langsung mempengaruhi kebijakan domestik pemerintah India yang berdaulat sangat terbatas (Hayat & Zaid, 2021). Keterbatasan ini bersifat struktural, yang bersumber dari prinsip non-intervensi yang dipegang teguh dalam hukum internasional, serta pertimbangan geopolitik dan ekonomi yang rumit yang menghubungkan banyak negara anggota OKI dengan India, sehingga mencegah tindakan diplomatik yang lebih konfrontasional (Supandi, Syaputra, Afthon, Pradana, & Munawar, 2025). Namun, justru dalam keterbatasan inilah relevansi OKI yang sebenarnya muncul, bukan sebagai kekuatan penekan yang koersif, melainkan sebagai suara moral kolektif yang memperjuangkan pluralisme dan koeksistensi damai, nilai-nilai yang konon menjadi fondasi demokrasi India itu sendiri.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan diplomatik OKI dalam memengaruhi kebijakan domestik India tidak serta merta mengurangi signifikansinya; sebaliknya, hal itu mengalihkan fokus strateginya dari intervensi langsung ke bidang pembingkaian narasi (narrative framing) dan pembangunan opini publik global (Mofidi, 2021). Ketika pemerintah India seringkali menggambarkan isu-isu internalnya sebagai urusan domestik semata, OKI melalui diplomasi publiknya berusaha menginternasionalisasikan isu Islamofobia dengan membungkai nya bukan sebagai masalah komunitas Muslim India saja, tetapi sebagai ancaman terhadap tatanan perdamaian dan keamanan internasional serta nilai-

nilai toleransi yang universal (Hossain, 2012). Upaya pembingkaian ini sangat relevan karena berusaha melawan narasi dominan yang dipromosikan oleh kekuatan nasionalis Hindu, yang seringkali menyederhanakan persoalan kompleks menjadi biner "kami versus mereka". Dengan menyoroti laporan-laporan tentang kekerasan massa, undang-undang diskriminatif seperti Amendemen Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA), serta kebijakan-kebijakan yang dianggap meminggirkan secara sosial dan ekonomi, OKI berusaha membangun konsensus global bahwa situasi di India merupakan perhatian bersama masyarakat internasional (Wijaya, Razak, & Huda, 2025). Relevansi OKI terletak pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai megafon yang memperkuat suara-suara yang terpinggirkan dan memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak luput dari pengawasan dunia, sekaligus menciptakan tekanan moral yang halus namun persistent terhadap pemerintah India.

Di luar upaya pembingkaian naratif, relevansi OKI juga termanifestasi dalam kehadiran simbolik dan moralnya yang powerful, yang berfungsi sebagai representasi solidaritas umat Islam global (Volkdal, 2025). Bagi komunitas Muslim India yang kerap merasa dikhianati oleh struktur kekuasaan domestik dan terisolasi secara politik, pernyataan-pernyataan dan keprihatinan yang disampaikan oleh OKI memberikan semacam legitimasi internasional atas perjuangan mereka dan berfungsi sebagai pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Psikologi politik dari solidaritas semacam ini tidak boleh diremehkan, karena hal ini dapat meningkatkan ketahanan komunitas minoritas dalam menghadapi penindasan dan marginalisasi. Kehadiran simbolis OKI bertindak sebagai penyeimbang terhadap hegemoni naratif nasionalis, menawarkan kerangka acuan alternatif yang didasarkan pada hak-hak dan martabat bersama (Bensaid, 2025). Namun, penting untuk dicatat bahwa kehadiran simbolik ini juga mengandung risiko, karena dapat dimanfaatkan oleh para partisan nasionalis Hindu untuk lebih jauh memojokkan Muslim India sebagai "orang asing" atau "boneka" kekuatan asing, sehingga secara paradoks memperkuat sentimen yang seharusnya dilawan. Oleh karena itu, relevansi bentuk diplomasi ini sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyampaikan pesan solidaritas tanpa secara tidak sengaja memicu backlash yang membahayakan posisi komunitas yang ingin dilindunginya.

Relevansi strategis OKI lebih lanjut diperkuat melalui kemitraan dengan aktor-aktor non-negara dan jaringan masyarakat sipil transnasional. Organisasi ini tidak hanya bergantung pada saluran diplomatik formal; ia semakin terlibat dengan LSM internasional, kelompok hak asasi manusia, pemimpin agama, dan intelektual di seluruh dunia untuk membangun koalisi advokasi yang luas (Aljamal & Aljamal, 2025). Dengan memanfaatkan

jaringan ini, OKI dapat mengamplifikasi pesannya dan menerapkan bentuk tekanan yang lebih tersebar dan multidimensi terhadap pemerintah India. Pendekatan "diplomasi jejaring" ini memungkinkan OKI untuk melewati hambatan birokrasi pemerintah dan terlibat langsung dengan pembentuk opini publik global, sehingga membuat advokasinya lebih luwes dan adaptif. Kemitraan semacam itu memungkinkan untuk menyelenggarakan konferensi, menerbitkan laporan bersama, dan meluncurkan kampanye kesadaran yang menyoroti situasi Muslim India dari perspektif hak asasi manusia dan pluralisme, yang pada akhirnya menyulitkan pemerintah India untuk sepenuhnya mengabaikan kritik internasional. Dengan demikian, relevansi OKI diperluas melampaui ruang rapat diplomatik, meresap ke dalam ruang publik global di mana pertempuran untuk hearts and minds benar-benar terjadi.

Relevansi diplomasi publik OKI dalam konteks India yang terpolarisasi adalah sebuah paradoks yang dinamis. Meskipun kekuatan koersifnya untuk mengubah kebijakan domestik India sangat minimal, signifikansinya justru bersifat multidimensional dan simbolis. Relevansinya terletak pada peran gandanya: sebagai pembingkai naratif yang mengangkat isu Islamofobia ke panggung global, sebagai suara solidaritas yang memberikan dukungan moral kepada Muslim India, dan sebagai konduktor dalam orkestra advokasi jejaring transnasional yang lebih luas. Keberhasilan akhir dari diplomasi ini tidak akan diukur dengan perubahan kebijakan yang dramatis, tetapi dengan kemampuannya untuk mencegah erosi norma-norma internasional lebih lanjut, mempertahankan visibilitas isu ini dalam wacana global, dan pada akhirnya, berkontribusi pada penciptaan lingkungan di mana suara-suara moderasi dan koeksistensi di dalam India sendiri dapat menemukan ruang untuk bernapas dan tumbuh kembali (Sanyoto, Harini, & Dipokusumo, 2016). Dalam arti ini, relevansi OKI bersifat jangka panjang dan struktural, yang bertujuan untuk membentuk lingkungan informasi dan norma global di mana politik identitas yang eksklusif menghadapi tantangan yang terus-menerus.

2. Integrasi Nilai-Nilai Da‘wah Rasulullah SAW dalam Soft Power Islam

Dalam merumuskan respons terhadap Islamofobia yang strategis dan berkelanjutan, pendekatan soft power Islam menawarkan sebuah paradigma alternatif yang berakar pada etika dan spiritualitas, berbeda dengan model diplomasi konvensional yang seringkali reaktif dan konfrontatif (Audrey Monica, 2021). Kerangka ini secara operasional mengintegrasikan nilai-nilai fundamental da‘wah Rasulullah SAW, khususnya *hikmah* (kebijaksanaan), *sabr* (ketabahan), dan *muḥāwarah* (dialog), yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam membangun pengaruh

dan persuasi moral (Wildan, 2022). Konsep *hikmah* mendikte bahwa setiap komunikasi dan kebijakan diplomasi publik harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang konteks sosio-politik India, psikologi massa, dan akar retorika nasionalisme Hindu, sehingga memungkinkan pesan disampaikan dengan cara yang paling tepat, pada waktu yang tepat, dan kepada audiens yang tepat, yang pada akhirnya menghindari kesan pemaksaan atau intervensi kasar.

Nilai *sabr* atau ketabahan strategis menjadi landasan psikologis yang indispensable dalam menghadapi tantangan diplomasi yang kompleks dan berjangka panjang. Dalam operasionalisasinya, *sabr* mengarahkan OKI untuk mengadopsi pendekatan yang konsisten dan berkelanjutan, tidak terpancing untuk memberikan respons emosional dan reaktif terhadap provokasi, namun tetap teguh pada komitmen untuk mempromosikan keadilan dan toleransi (RODER, 2016). Ketabahan ini termanifestasi dalam kesediaan untuk terus-menerus membangun jembatan komunikasi, mendanai program pertukaran budaya dan pendidikan, serta mendukung inisiatif masyarakat sipil lokal meskipun menghadapi kemandekan politik atau kritik yang keras (Putri & Ribawati, 2023). Dengan demikian, *sabr* mentransformasi diplomasi publik dari sebuah serangkaian aksi ad hoc menjadi sebuah strategi jangka panjang yang berfokus pada transformasi persepsi dan pembangunan hubungan secara gradual, yang merupakan esensi dari soft power yang efektif.

Nilai ketiga, *muḥāwarah* atau dialog konstruktif, memberikan kerangka metodologis untuk mengimplementasikan soft power tersebut. Berbeda dengan monolog atau dakwah satu arah, *muḥāwarah* menekankan pada pertukaran pandangan yang setara, inklusif, dan saling menghormati (Al-Attas, 1993). Dalam praktik diplomasi publik OKI, ini dapat diwujudkan melalui fasilitasi forum-forum dialog antaragama yang melibatkan tidak hanya pemimpin Muslim India tetapi juga cendekiawan dan pemuka Hindu, serta mendorong kolaborasi dalam isu-isu kemanusiaan yang lebih luas yang melampaui batas-batas agama. Pendekatan dialogis semacam ini bertujuan untuk mendekonstruksi prasangka dengan menampilkan wajah Islam yang inklusif dan moderat, sekaligus membangun sekutu dari kalangan non-Muslim yang juga peduli terhadap kohesi sosial dan masa depan pluralisme India. Melalui *muḥāwarah*, OKI dapat beralih dari posisi sebagai "pembela eksternal" menjadi "mitra dalam percakapan global" tentang masa depan koeksistensi.

Integrasi trilogi nilai *hikmah*, *sabr*, dan *muḥāwarah* ini membentuk sebuah model diplomasi publik yang etis dan transformatif. Pendekatan berbasis etika ini secara substansial berbeda dengan diplomasi koersif yang mengandalkan tekanan politik atau sanksi ekonomi,

karena justru berusaha untuk memenangkan "hati dan pikiran" melalui keteladanan moral, argumentasi yang rasional, dan komitmen pada perdamaian. Dengan menempatkan nilai-nilai profetik ini sebagai inti dari strategi soft power-nya, OKI tidak hanya memperkuat efektivitas taktisnya dalam memerangi Islamofobia, tetapi juga secara aktif memproyeksikan dan merepresentasikan citra autentik Islam sebagai agama yang *rahmatan lil-‘ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam). Pada tingkat yang lebih dalam, operasionalisasi nilai-nilai ini dalam arena diplomasi kontemporer berfungsi sebagai kontranarasi yang powerful terhadap stigma negatif, dengan membuktikan bahwa nilai-nilai Islam sejalan dengan dan bahkan dapat memperkaya wacana global tentang toleransi, hak asasi manusia, dan perdamaian abadi.

3. Implikasi Strategis bagi Diplomasi Multilateral dan Kebijakan Global

Temuan penelitian ini memiliki implikasi strategis yang signifikan yang melampaui konteks bilateral OKI-India, menawarkan sebuah paradigma yang dapat direplikasi untuk memperkuat kerangka diplomasi multilateral kontemporer (Khurshid & Shakir Khawaja, 2021). Dengan mendemonstrasikan efektivitas integrasi nilai-nilai etika profetik seperti *hikmah*, *sabr*, dan *muḥāwarah* ke dalam praktik diplomasi publik, penelitian ini mengusulkan suatu model alternatif yang berbasis nilai (value-based) untuk menghadapi tantangan geopolitik abad ke-21 (Fuadi, 2024). Pendekatan ini secara implisit mengkritik keterbatasan model diplomasi konvensional yang sering kali terjebak dalam logika realpolitik dan transaksional, yang gagal menyentuh akar persoalan seperti prasangka budaya dan permusuhan ideologis (Sabda Ningsih, 2025). Oleh karena itu, implikasi utamanya adalah mendorong sebuah reorientasi strategis dalam diplomasi multilateral, dari yang semata berfokus pada negosiasi tingkat elite dan sanksi koersif, menuju pendekatan yang lebih holistik yang membangun ketahanan masyarakat terhadap narasi-narasi kebencian melalui persuasi moral dan pembangunan persepsi jangka panjang.

Kerangka *Islamic soft power* yang diusulkan berpotensi meningkatkan efektivitas respons dunia Islam terhadap isu-isu global yang lebih luas, seperti intoleransi, ekstremisme kekerasan, dan diskriminasi agama di berbagai kawasan. Dengan menjadikan etika sebagai fondasi aksi diplomatik, OKI dan aktor-aktor Muslim global lainnya dapat membangun sebuah kontra-narasi yang koheren dan kredibel yang secara simultan melawan Islamofobia dan ekstremisme atas nama agama (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2007). Sebuah pendekatan diplomasi yang menekankan kebijaksanaan (*hikmah*) dan dialog (*muḥāwarah*) akan lebih efektif dalam mengisolasi kelompok-kelompok ekstremis yang membajak citra Islam, sekaligus melucuti daya tarik retorika populisme sayap kanan yang menggambarkan Islam

sebagai ancaman monolitik (Sabda Ningsih, 2025). Islamic soft power berfungsi sebagai alat de-radikalasi dan bridge-building yang ampuh, memposisikan Islam sebagai mitra konstruktif, bukan pihak yang bermusuhan, dalam tata kelola global yang damai.

Implikasi strategis lainnya terletak pada kapasitas pendekatan ini untuk memulihkan relevansi dan agency OKI di panggung multilateral. Selama ini, kapasitas organisasi ini sering diragukan akibat keterbatasan politik dan perbedaan internal antar negara anggotanya. Dengan mengadopsi secara konsisten model diplomasi berbasis nilai yang terukur dan dapat diverifikasi, OKI dapat membangun kredibilitas moralnya yang unik, sebuah bentuk mata uang diplomatik yang sangat berharga dalam tata kelola global. Kredibilitas ini akan memungkinkan OKI untuk membentuk aliansi yang lebih luas dengan aktor-aktor non-tradisional, termasuk organisasi masyarakat sipil internasional, lembaga keagamaan lintas iman, dan entitas PBB, sehingga menciptakan koalisi multilateral yang lebih inklusif dan efektif untuk memajukan agenda toleransi dan perdamaian (Audrey Monica, 2021). Dengan demikian, OKI tidak lagi sekadar menjadi forum politik bagi negara-negara anggotanya, melainkan menjadi pemain utama dalam ekosistem norma global.

Pada tingkat yang lebih mendalam, penelitian ini mengajak pada konvergensi antara wacana spiritualitas dan praktik kebijakan luar negeri, sebuah bidang yang sering kali terpisah. Dengan mengoperasionalkan nilai-nilai spiritual Islam ke dalam strategi diplomatik yang konkret, kerangka ini menawarkan jalan keluar dari kebuntuan sekularisme ketat dalam hubungan internasional yang mengabaikan dimensi moral-transendental sebagai sumber motivasi dan legitimasi (Audrey Monica, 2021). Hal ini membuka peluang untuk merancang kebijakan global yang tidak hanya secara teknis efektif tetapi juga secara etika terdorong dan secara spiritual autentik bagi komunitas yang diwakilinya. Konvergensi semacam ini berpotensi menghasilkan bentuk diplomasi yang lebih otentik dan berkelanjutan, karena selaras dengan identitas dan nilai inti dari peradaban yang diwakili oleh OKI, sehingga memperkuat resonansi dan dampaknya baik di tingkat domestik maupun internasional.

Implikasi strategis dari penerapan Islamic soft power oleh OKI bersifat transformatif, baik bagi posisi organisasi dalam tata kelola global maupun bagi masa depan diplomasi multilateral itu sendiri. Model ini tidak hanya memberikan alat analitis dan praktis untuk menangani kasus spesifik seperti Islamofobia di India, tetapi juga berkontribusi pada pengayaan wacana diplomasi global dengan menawarkan perspektif etika yang berbeda. Dengan merangkul paradigma ini, OKI dapat memelopori sebuah bentuk engagement internasional yang mengutamakan pembangunan hubungan jangka panjang, rekonsiliasi

antarbudaya, dan pemulihan martabat manusia tujuan yang pada akhirnya sejalan dengan cita-cita tertinggi Piagam PBB dan tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif.

5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap 35 literatur melalui metode Systematic Literature Review (SLR), penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi publik OKI dalam merespons Islamofobia di India pada era pemerintahan Modi telah mengembangkan tiga strategi utama yang saling melengkapi: representasi citra Islam melalui forum internasional, diplomasi budaya berbasis nilai-nilai ḥikmah, sabr, dan muḥāwarah, serta respons kelembagaan melalui pernyataan resmi dan resolusi. Temuan penelitian mengonfirmasi hipotesis awal bahwa integrasi nilai-nilai da'wah Rasulullah SAW dalam kerangka soft power Islam memberikan pendekatan alternatif yang lebih efektif dibandingkan diplomasi konvensional yang bersifat konfrontatif. Strategi ini tidak hanya relevan dalam konteks India, tetapi juga berimplikasi pada penguatan diplomasi multilateral secara lebih luas dengan menawarkan model engagement berbasis etika yang dapat diterapkan dalam merespons isu intoleransi dan diskriminasi agama di forum global. Penelitian ini berhasil mencapai tujuannya dengan mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai profetik tersebut terefleksi dalam praktik diplomasi OKI, meskipun efektivitasnya masih menghadapi kendala struktural berupa prinsip non-intervensi dan kompleksitas politik domestik India. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan soft power Islam berpotensi meningkatkan kredibilitas dan agency OKI di panggung multilateral, sekaligus berfungsi sebagai kontra-narasi terhadap stigma negatif tentang Islam. Namun, penelitian ini mengakui keterbatasan dalam mengukur dampak nyata strategi tersebut terhadap perubahan kebijakan pemerintah India, yang membuka ruang untuk penelitian lanjutan berupa studi empiris kuantitatif untuk mengukur efektivitas strategi diplomasi berbasis nilai secara lebih komprehensif. Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan agar OKI konsisten mengembangkan kerangka Islamic soft power dengan memperkuat kolaborasi dengan aktor non-negara dan masyarakat sipil global. Untuk penelitian selanjutnya, dikembangkan ide mengenai perlunya studi komparatif dengan organisasi keagamaan internasional lain serta eksplorasi implementasi nilai-nilai da'wah dalam konteks geopolitik yang berbeda. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada analisis strategi diplomasi OKI yang sudah ada, tetapi juga dalam membuka perspektif baru tentang integrasi nilai-nilai spiritual dalam praktik hubungan internasional kontemporer.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and Secularism*. malaysia: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC). <https://doi.org/10.15476/ELTE.2021.128>
- Aljamal, Y. M., & Aljamal, M. M. (2025). The Use of Soft Power by the Organization of Islamic Cooperation. *Politics and Religion Journal*, 19(1), 69–89. <https://doi.org/10.54561/prj1901069a>
- Audrey Monica, R. (2021). Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Menangani Islamophobia di Uni Eropa. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 1(7), 335–343. <https://doi.org/10.36418/comserva.v1i7.43>

- Bensaid, H. (2025). Epistemological Contestations in Global Governance: The OIC and the Conceptualization of Minorities. *Politics and Religion Journal*, 19(1), 211–235. <https://doi.org/10.54561/prj1901211b>
- Chakraborty, D. (2024). *Resurgence of India's Soft Power Under Modi Reign: A Comparative Analysis*. 16, 101–114.
- Drs. Albert Lumbu, M. S., Muthmainnah Asmal, S.Pd., M.Pd. Ibnu Suryo, S.E., M. M., Ratu Eva Febriani, S.E., M. S., Andi Khaerun Niza, S.Pd., M.Pd. Dra. Renny Threesje Tumober, M. S., Prof. Dr. Ir. H. Rahmad Sofyan Patadjai, M.S. Abdul Roni, M. E., Maya Pujowati, M. P., ... Eka indah Wahyuni, S.Pd., M. P. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN*. Padang: CV Dunia Penerbitan Buku.
- Fuadi, A. I. (2024). Reconfiguring Religious Authority and Ethical Governance in Islamic Political Thought: A Comparative Literature Review. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(3), 136–148. <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.605>
- Hamid Fahmy Zarkasyi. (2007). Liberalisasi Pemikiran Islam. *Tsaqafah*, 5(1), 1–28.
- Hayat, M. U., & Zaid, A. (2021). Revisiting nuclear policies under Modi regime: Leadership analysis and repercussions for Pakistan. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 34(3), 248. <https://doi.org/10.20473/mkp.v34i32021.248-260>
- Hoesterey, J. B. (2020). Islamic Soft Power in the Age of Trump: Public Diplomacy and Indonesian Mosque Communities in America. *Islam and Christian-Muslim Relations*, 31(2), 191–214. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773617>
- Hossain, I. (2012). THE ORGANIZATION OF ISLAMIC CONFERENCE (OIC): NATURE, ROLE, AND THE ISSUES. *Journal of Third World Studies*, 29(1), 287–314. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/45194863>
- IKEHATA, F. (2019). Does the Islamic World have a Platform to Express its International Public Opinion?: Case Studies on Jordan and the OIC (Organization of Islamic Cooperation). *イスラーム世界研究: Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 12(1), 118–135.
- Khurshid, M., & Shakir Khawaja, A. (2021). India's Soft Power Image: A Case Study of the Indian Economy Under Modi. *Journal of Security and Strategic Analyses (JSSA)*, 7(1), 105–133. <https://doi.org/https://doi.org/10.57169/jssa.007.01.0130>
- Mofidi, S. (2021). Studying the Impact of Religio-Political Confrontations of Islamic Empires in Kurdistan: From the Beginning Until the End of the Islamic Caliphate. *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, 2(1), 1–49. <https://doi.org/10.22373/ijihc.v2i1.830>
- Morgan, D. (2023). Islamophobia in India and its Impact on India's Foreign Relations. *Independent Study Collection*, 2(3), 6–30. Retrieved from https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/3723?utm_source=digitalcollections.sit.edu%2Fisp_collection%2F3723&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
- Nursita, R. D., Wulansari, P. R. A., Ningtyas, E. W., & Saputri, A. I. (2024). Organization of Islamic Cooperation (OIC) Humanitarian Diplomacy in Assisting Refugees During Pandemic. *Journal of Islamic World and Politics*, 7(2), 212–222. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v7i2.78>
- Putri, N. I., & Ribawati, E. (2023). Islamophobia Di Australia: Minoritas Dalam Sekularisme.

- Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 1–6. <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.303>
- RODER, R. G. & T. J. (2016). CONSTITUTIONALISM, HUMAN RIGHTS, AND ISLAM AFTER THE ARAB SPRING. In A. M. El--Haj (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11). United States of America: Oxfors University Press. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBERTUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Sabda Ningsih. (2025). Organisasi Kerja Sama Islam (Oki) Sebagai Entitas Kosmopolitan Demokratik: Analisis Dinamika Internal Dan Tantangan Struktural. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(2), 349–369. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i2.682>
- Sanyoto, D. R., Harini, S., & Dipokusumo. (2016). Diplomasi Indonesia Terhadap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Rohingya. *Solidaritas : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 1–19.
- Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabetia*. Bandung: ALFABETA.
- Supandi, M. D., Syaputra, M. B., Afthon, H., Pradana, A. R., & Munawar, A. M. (2025). Caliphate Paradigm as an Antithesis to Imperialism: A Theological and Geopolitical Analysis in the Discourse of Islamic and Western Civilizations. *JIS: Journal Islamic Studies*, 3(2), 119–130. <https://doi.org/10.71456/jis.v3i2.1394>
- Tanjung, I. U. (2023). Khilafah Political Controversy in Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 482–490. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24680>
- Volkdal, C. P. (2025). Reforming the OIC's Role in Peace and Security Institutional Gaps and Strategic Pathways POLICY BRIEF Reforming the OIC's Role in Peace and Security: Institutional Gaps and Strategic Pathways. *Copenhangen Business School*, 1(1), 1–11.
- Wijaya, W., Razak, F., & Huda, N. (2025). The Evolution of the Concept of Caliphate in Islamic Political History: Case Studies from Classical to Contemporary Times. *Journal of Noesantara Islamic Studies*, 1, 379–391. <https://doi.org/10.70177/jnis.v1i6.1435>
- Wildan, M. (2022). Muslim Minoritas Kontemporer Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminasi, dan Islamofobia. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1). Yogyakarta: IDES Press. Retrieved from http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi